

**SINERGITAS MASYARAKAT DAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA
BANJIR DI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ivansyah Fauzie
NPP. 30.0104

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: ivansyahfauzie8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Marzuki, SP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP): Floods in Medan City, North Sumatra Province, still often occur every year caused by high-intensity rain which causes several waterways in certain areas to overflow and eventually inundate the Medan City area of North Sumatra Province. **Purpose:** this study was conducted to find out how the synergy between the community and the Medan City Regional Disaster Management Agency in handling the aftermath of the flood disaster and find out what obstacles and efforts are made by the community and the Medan City Regional Disaster Management Agency in overcoming it. **Method:** The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with interview, observation and documentation techniques. **Result:** The synergy between the community and the Regional Disaster Management Agency in handling the aftermath of the flood disaster in Medan City, North Sumatra Province, is generally quite good. In this case, based on the results of the research, BPBD Medan City and the community always respond and are active and have established good communication and coordination. **Conclusion:** The results of this study conclude that the synergy of the community and the Regional Disaster Management Agency in post-Flood Management in Medan City, North Sumatra Province, is generally quite good. In this case, based on the results of research, both parties have fulfilled what is meant by synergy, but there are several indicators that have not been said to be good enough because the handling of rehabilitation and reconstruction is less than optimal because it is caused by the area and population density of Medan City and there are still people who are not aware so as to hinder post-flood handling in Medan City, North Sumatra Province

Keywords: Synergy, Community, BPBD, post-flood management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Bencana banjir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara masih sering terjadi di setiap tahunnya di sebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi yang mengakibatkan beberapa saluran air di daerah tertentu meluap dan akhirnya menggenangi wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam penanganan pasca bencana banjir serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang di lakukan masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam penanggulangannya. **Metode:** Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Temuan:** Sinergitas masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara secara umum cukup baik. Dalam hal ini berdasarkan hasilpenelitian, BPBD Kota Medan dan masyarakat selalu merespon dan aktif serta telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang cukup baik. **Kesimpulan:** Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan pasca Bencana Banjir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah cukup baik. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian kedua belah pihak telah memenuhi apa yang dimaksud bersinergitas, namun ada beberapa indikator yang belum dikatakan cukup baik karena dalam penanganan pada rehabilitasi dan rekonstruksi kurang maksimal karena disebabkan oleh luas wilayah dan kepadatan penduduk Kota Medan serta masih adanya oknum masyarakat yang kurang sadar sehingga menghambat penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Kata kunci: Sinergitas, Masyarakat, BPBD, penanganan pasca bencana banjir



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang rawan akan terjadinya bencana. Ini diakibatkan letak geografis Indonesia terletak pada kawasan rawan bencana. Letak cincin api pasifik (ring of fire) dan terdapat tiga lempeng yang bertemu yaitu Eurasia, Indorustralia serta lempeng pasifik menjadi salah satu pemicu Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana. Terdapat tiga kategori bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yakni banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, kekeringan, serta adapun kategori bencana non alam yaitu kebakaran, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kategori bencana sosial yaitu kerusuhan, konflik sosial, dan berbagai kekacauan sosial.

Provinsi Sumatera Utara ialah salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Salah satunya berada di ibukota provinsi yaitu kota Medan yang merupakan salah satu dari tiga kota terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta serta Surabaya. Medan mempunyai luas 26.510 hektar (3,6%) dari total luas Sumatera Utara. Medan ialah kota/kabupaten kecil dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara serta 98° 35'–98° 44' Bujur Timur. Posisi topografi Kota Medan cenderung miring ke utara serta terletak pada ketinggian 2,5 hingga 37,5 Mdpl. Provinsi Sumatera Utara mempunyai 14 bencana alam, yakni banjir, longsor, kebakaran hutan lahan, kebakaran, tsunami, gempa bumi, banjir bandang, penyakit, kegagalan teknologi, angin puting beliung, kekeringan, letusan gunung berapi. Bencana sosial termasuk perselisihan sosial serta teror yang diakibatkan oleh manusia. Sementara kegagalan teknologi, modernisasi yang gagal, epidemi, serta wabah penyakit ialah bencana non- alam.

Kota Medan ialah lokasi rawan banjir dari sedang hingga tinggi. Terdapat 21 kecamatan di Kota Medan dan beberapa diantaranya berpotensi banjir. Masyarakat harus mewaspadaai bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang. Hujan dengan intensitas tinggi membanjiri sungai Deli, Babura, serta Denai. Banjir melanda Kecamatan Medan Johor, Maimun, Polonia, Helvetia, dan Amplas. Tidak hanya itu penyebab lain adalah karena kepadatan penduduk dan kurangnya wawasan dari masyarakat itu sendiri akan bencana banjir.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dampak dari bencana Di Kota Medan bagi masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian dalam bentuk fisik maupun materi. Hal ini dikarenakan hampir setiap tahunnya bencana tersebut terjadi dan seperti permasalahan yang tidak ada habisnya.

Tabel 1.1

Data Kota Berpotensi Banjir Provinsi Sumatera Utara

KOTA	BENCANA BANJIR		
	2018	2019	2020
SIBOLGA	3	1	5
TANJUNG BALAI	5	-	-
PEMATANG SIANTAR	12	5	7
TEBING TINGGI	25	12	13
MEDAN	30	29	25
BINJAI	7	1	6
PADANG SIDIMPUAN	9	10	7
GUNUNG SITOLI	10	14	3

Data tersebut dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota yang paling banyak terdampak bencana banjir. Husni, Kepala BPBD Kota Medan menyebut, banjir terjadi di 17 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan di Medan. Sembilan kecamatan yang terdampak itu yakni Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, dan Medan Barat. Banjir merendam sekitar 1.699 rumah dengan 1.843 KK atau 5.907 jiwa terdampak. Warga yang terpaksa dievakuasi berjumlah 238 orang. Penelitian kali ini peneliti lebih berfokus pada penanganan pasca bencana yang artinya penanganan saat sesudah terjadinya bencana. Dalam penanganan pasca bencana terdapat dua tahapan rehabilitasi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk pemulihan dan demi untuk kebutuhan pokok warga yang terdampak bencana, dan rekonstruksi adalah langkah perbaikan yang sifatnya permanen. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada sinergitas masyarakat dan BPBD dalam penanganan bencana alam dalam tahap pasca bencana. Hal ini mengingat bencana tersebut telah terjadi berulang kali serta mengakibatkan banyak kerugian baik materi hingga korban jiwa. Oleh karena itu pemerintahan daerah Kota Medan melalui BPBD serta masyarakat sebagai objek bencana berperan penting pada penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada pelaksanaan kajian penelitian ini, peneliti juga berpatokan dan berpedoman pada penelitian terdahulu yang juga membahas tema yang berkaitan erat atau yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul *Kajian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Enrekang*. Penelitian Pertama yang menjadi inspirasi peneliti ini ditulis oleh Henrika Riantika (2021). Peneliti sebelumnya menyimpulkan temuan penelitiannya tentang peran BPBD untuk menerapkan prinsip manajemen bencana yang baik, yakni dengan menetapkan kebijakan, pencegahan bencana, tanggap darurat, konstruksi dan rehabilitasi. Dengan adanya prinsip manajemen bencana yang baik dengan dinas serta instansi terkait agar kemudian saling mendukung dalam penanggulangan bencana. Penelitian kedua berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ini disusun oleh Ningsih Ayuni Cahya (2022). Peneliti terdahulu menyimpulkan hasil penelitiannya yakni peran BPBD dalam penanganan pasca bencana banjir ialah menciptakan rencana program rehabilitasi dan fasilitas pemberian bantuan secara adil serta menyeluruh terhadap korban bencana dan juga dengan Menyusun rencana dan penyelenggaraan rekonstruksi. Adapun persamaan dari penelitian yang akan peneliti jadikan acuan maupun referensi dalam hal ini adalah membahas tentang penanganan pasca bencana banjir oleh BPBD. Penelitian ketiga berjudul *Kajian Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ketiga ini disusun oleh Indah Lestari pada tahun 2022. Peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya dukungan kepada masyarakat dalam membantu pemulihannya seperti jaminan hidup, uang pokok, serta hunian tetap sehingga membantu masyarakat dalam penanganan pasca bencana. Tidak hanya itu masyarakat perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar bangkit dari keterpurukan dari pasca terjadinya banjir. Selanjutnya penelitian terakhir yang menjadi inspirasi bagi peneliti dalam menyusun karya ini ialah penelitian berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan*. Penelitian ini merupakan tulisan dari Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana. Ditahun 2010 dalam Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Vol. 01 No. 02(2010). Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemberdayaan masyarakat belum optimal. Pelatihan tentang bencana belum efektif serta tidak adanya SOP yang jelas tentang pemberdayaan masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Pada penelitian terdahulu yang pertama penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Padang sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kota Medan Sumatera Utara. Pada penelitian sebelumnya peneliti tidak menemukan objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu melakukan penelitian terkait sinergi masyarakat dan BPBD. Penelitian ketiga membahas tentang pentingnya dukungan kepada masyarakat dalam membantu pemulihannya seperti jaminan hidup, uang pokok, serta hunian tetap. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada sinergitas masyarakat dan BPBD dalam penanganan bencana alam dalam tahap pasca bencana. Pada penelitian keempat peneliti sebelumnya mengkaji pemberdayaan masyarakat pada fase mitigasi pengurangan resiko bencana. Sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada sinergitas masyarakat dan BPBD Kota Medan dalam fase pasca bencana.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam penanganan pasca bencana banjir serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam penanggulangannya.

II. METODE

Pendekatan penelitian tentunya sangat diperlukan pada pelaksanaan riset, hal tersebut dikarenakan metode tersebut adalah cara untuk peneliti mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ialah guna mengungkapkan suatu permasalahan dengan langkah langkah ataupun beberapa proses yang perlu dilakukan dan relevan dengan masalah yang peneliti rumuskan. Peneliti pada penelitian ini menerapkan pendekatan jenis deskriptif kualitatif. Creswell J.W dalam buku *Research Design* (2016) berpendapat arti dari penelitian kualitatif yakni riset yang dimanfaatkan guna meneliti permasalahan manusia serta sosial, dimana peneliti melaporkan temuan risetnya berlandaskan data di lapangan, kemudian dideskripsikan melalui laporan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data pendekatannya induktif, kualitatif dan *output* penelitian ditekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9). Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan, Sekretaris BPBD Kota Medan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta masyarakat Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Maimun, dan Medan Helvetia yang masing masing terdiri dari 2 orang informan disetiap Kecamatannya. Adapun analisisnya menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memecahkan masalah ini, peneliti menggunakan teori sinergitas oleh Covey (2011) yaitu sinergitas merupakan suatu perpaduan dua unsur atau beberapa unsur untuk menghasilkan keluaran terbaik ataupun hasil yang baik. Sinergitas sendiri memiliki dua unsur yaitu komunikasi dan koordinasi sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sudah sejauh mana komunikasi dan koordinasi yang telah terjadi di masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan.

3.1. Sinergitas Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti bertujuan guna untuk mengetahui sudah sejauh mana sinergitas antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan saat ini. selaku instansi yang bertanggung jawab bidang bencana alam dan non alam Kota Medan Mengacu pada Peraturan Daerah No 8

Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara no.24 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Permasalahan banjir di Kota Medan merupakan suatu bencana yang terus terjadi berulang ulang tiap tahunnya untuk ini pentingnya sinergitas antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi permasalahan ini tetapi bencana banjir tetap saja menjadi bencana yang sering terjadi.

Untuk saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat merupakan dua inti dari permasalahan ini, karena BPBD sebagai penanggung jawab atas bencana yang terjadi dan masyarakat merupakan objek yang terkena bencana tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan tidak hentinya untuk terus memaksimalkan dan mengimplementasikan kebijakan kebijakan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Walikota Medan no 1 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD salah satunya terus menerus memperbaiki sarana prasarana yang diperlukan guna mengurangi risiko banjir, melakukan sosialisasi dan membentuk posko bencana sebagai program kelurahan tanggap bencana. Masyarakat Kota Medan tentunya harusnya dapat dengan baik bersinergi guna mengurangi risiko dari pasca bencana banjir tersebut akan tetapi kenyataannya tidak semua masyarakat sadar dan memiliki kemauan untuk mendukung program tersebut sehingga bencana tersebut terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kota Medan telah mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat semaksimal mungkin seperti sosialisasi, perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak membentuk kelurahan tanggap bencana dan melakukan perbaikan di titik rawan bencana pada saluran pembuangan air. Tidak hanya itu BPBD Kota Medan juga selalu siap siaga dan menginformasikan kepada masyarakat kondisi cuaca dan meminta masyarakat untuk siaga apabila berpotensi terjadi bencana

3.2. Faktor Penghambat Sinergitas Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan

Luas wilayah Kota Medan dan jumlah penduduk yang padat menyebabkan pembekalan kepada masyarakat akan pentingnya wawasan mengenai bencana dan apa yang harus dilakukan masyarakat merupakan permasalahan yang menghambat langkah awal untuk menangani permasalahan banjir ini. Untuk mengatasi permasalahan yang menghambat penanganan banjir di Kota Medan dalam segi luas wilayah pemerintah membentuk Kelurahan Tanggap Bencana sehingga diharapkan mampu berkoordinasi tentang kondisi dilapangan baik sebelum bencana, saat bencana dan sesudah bencana. Kelurahan Tanggap Bencana ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko bencana berbasis komunitas atau disebut PRBK yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2012 menjadi acuan BPBD setiap daerah termasuk Kota Medan. Faktor penghambat lainnya adalah anggaran. Mengenai anggaran adalah hal yang pokok dan krusial dalam setiap instansi pemerintahan.

Anggaran menjadi salah satu acuan dalam pencapaian keberhasilan tupoksi instansi yang sesuai diharapkan, maka dari itu BPBD Kota Medan berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memaksimalkan anggaran yang ada sesuai peraturan dan kebijakan kepada pemerintahan daerah mengenai dana anggaran yang diberikan kepada BPBD berdasarkan peraturan Pendanaan dan pengelolaan pada PP no 22 tahun 2008 yang mengatur dengan jelas mengenai dana anggaran untuk BNPB/BPBD. Meski begitu anggaran tersebut harus dimaksimalkan demi memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dapat menekan risiko ataupun mengurangi risiko dari bencana.

Faktor penghambat lain yang disebutkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan ialah kurangnya sarana dan pra sarana baik yang telah tidak layak pakai maupun kurang di perbarui Hambatan ini tentunya menyebabkan untuk penanganan bencana terhambat karena mobilisasi kelokasi tujuan untuk berkoordinasi dengan masyarakat penting untuk mempercepat proses penanganan , dan kurangnya perbaruan sarana prasarana yang memadai juga pasti akan berdampak pada waktu penanganan bencana dimana kita ketahui

bersama bahwasanya apabila penanganan bencana tidak cepat dilakukan maka akan berdampak pada besarnya risiko yang diterima korban juga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap berupaya melakukan berbagai cara dan salah satunya yaitu membuat proposal anggaran kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Medan demi memenuhi segala kebutuhannya tentunya juga untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan juga intinya untuk menekan tingkat risiko yang disebabkan oleh bencana.

Masyarakat dalam hal ini telah mendapat pembekalan tentang banjir oleh pihak-pihak terkait tentang permasalahan bencana, namun ada beberapa masyarakat yang tidak peduli dan tidak tertarik mengikuti pembekalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan masyarakat masih kurang sadar akan lingkungannya yang menyebabkan kerugian baginya sendiri. Membuang sampah sembarangan menjadi salah satu contohnya. Dalam hal ini masyarakat harusnya lebih bisa menjaga lingkungannya dan tidak hanya itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan tegas untuk masyarakat yang kurang memiliki kesadaran atas lingkungannya.

3.3. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Sinergitas Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan

Upaya penanganan pasca bencana adalah tahapan paling akhir yang dilakukan setelah pra bencana dan tanggap darurat yang berupa upaya yang dilakukan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat setelah terjadinya bencana demi mengurangi dampak atau risiko dari bencana tersebut. Pasca Bencana sering disebut dengan masa pemulihan dimana didalamnya terdapat rekonstruksi dan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana yang belum rusak sepenuhnya serta dapat diperbaiki dan juga mencakup perbaikan atau normalisasi bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan bidang vital lainnya. Sedangkan bidang rekonstruksi berfokus pada pembangunan ulang sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat digunakan ataupun diperbaiki kembali. Pemerintah Daerah Kota Medan melalui BPBD Kota Medan sebelum terjadinya bencana telah melakukan pembekalan pada masyarakat sebagai langkah awal dalam penanganan pasca bencana banjir ini sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat pasca bencana. Langkah awal ini menjadi strategi untuk penanganan pasca bencana dengan cara menjalin sinergitas dengan masyarakat terlebih dahulu sebagai objek langsung dari dampak bencana banjir tersebut sehingga memudahkan dalam proses penanganan pasca bencananya.

Upaya lain yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan ialah dengan menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah dibentuk yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dengan mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, serta pemerintahan dan analisis kebutuhan sosial dan perlindungan social. Tim Reaksi Cepat juga andil dalam melaporkan secara periodik perkembangan di lapangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dan juga memperlancar koordinasi dengan pihak lain yang terkait serta mengkoordinir posko Waspada Siaga Bencana yang telah dibentuk dan disebar di beberapa titik rawan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bertindak cepat dengan merekap apa yang terjadi di lapangan untuk mengambil langkah selanjutnya berdasar laporan yang diterima dari pihak yang ada di lapangan baik Tim Reaksi Cepat maupun pihak lain yang ikut andil dalam proses penanganan pasca bencana tersebut. Laporan tersebut juga diteruskan dan ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang untuk mempercepat proses pemulihan baik pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dan diperlukan masyarakat saat itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkan para korban bencana serta memenuhi kebutuhan dan keluhan yang ada di antara masyarakat korban bencana tersebut. Pemulihan sarana dan fasilitas yang rusak karena bencana nantinya akan dilaporkan ke pihak lain yang terkait agar segera diperbaiki serta pemulihan fisik dan mental

korban akibat bencana juga akan difasilitasi sesuai ketentuan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bagian Sub Koordinator Lingkup Rehabilitasi adalah merancang pemetaan tentang wilayah kebencanaan dengan dibantu pihak lain dan menaruh kepercayaan kepada masyarakat juga dengan harapan agar mengetahui wilayah yang layak di huni sehingga mengurangi terjadinya risiko dari suatu bencana dan menentukan lahan tetap untuk pemukiman masyarakat. Langkah tersebut juga bertujuan agar masyarakat kedepannya dapat memilih tempat hunian yang layak di huni dan terhindar dari bencana khususnya banjir yang menjadi bencana rutin terjadi. Masyarakat juga berperan dan ikut andil dengan cara melakukan melaporkan kondisi di lapangan ke posko sesuai dengan program Kelurahan Tanggap Bencana atau Desa Tanggap Bencana (DESTANA) serta gotong royong rutin secara bersama sama demi mengurangi risiko dari tersumbatnya aliran pembuangan air yang dikarenakan sampah yang tersumbat yang kadang kala menyebabkan air dari saluran pembuangan meluap dan mengakibatkan genangan air yang berlebih sehingga menyebabkan banjir. Kebiasaan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan juga terus di ingatkan oleh pemerintah sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan diharapkan membuang sampah pada tempat yang sediakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Terkait sinergitas BPBD dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan terdapat beberapa faktor menghambat dalam penanganan pasca bencana alam yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah, meliputi:

- a. Jangkauan Wilayah Kota Medan yang luas
- b. Realisasi Anggaran
- c. Pengadaan Sarana dan Parasarana
- d. Kesadaran Masyarakat

Upaya yang dilakukan terdiri dari beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan:

- a. Implementasi Kebijakan pemerintahan daerah dalam penanganan pasca banjir di Kota Medan
- b. Pembentukan pos Kelurahan Tanggap Bencana atau Desa Tanggap Bencana (DESTANA), Pengkajian cepat dan tepat informasi dan data mengenai lokasi bencana dengan Tim Reaksi Cepat dan pihak lain yang terkait
- c. Melakukan pengajuan anggaran mengenai perbaruan saran dan prasarana guna menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam bertugas

IV. KESIMPULAN

Sinergitas antara masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan dapat dikatakan sudah memenuhi berjalan dengan baik. Berdasarkan kebijakan yang ada, dimana Pemerintah pusat maupun daerah sudah menetapkan peraturan yang jelas mengenai Badan Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman pada setiap masyarakat dan pihak instansi pemerintahan yang terkait dalam menghadapi bencana sudah diterapkan dengan baik. Menurut teori sinergitas yang telah dibahas tentunya pentingnya adanya komunikasi dan koordinasi untuk memenuhi teori tersebut. Masyarakat merespon dengan baik upaya pemerintah melalui BPBD dalam penanganan pasca bencana banjir tersebut, dibuktikan dengan adanya koordinasi dengan masyarakat dalam merealisasikan apa yang sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan kedua pihak melalui komunikasi yang baik sehingga memperlancar proses penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan tersebut. BPBD sudah merealisasikan segala kebutuhan masyarakat dan keluhan serta pemberian sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang penanganan bencana, dan juga tentang perbaikan masyarakat yang tertimpah musibah disebabkan oleh bencana. BPBD dalam penanganan hal ini begitu aktif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu melaksanakan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terlebih terkait penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir di Kota Medan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni S.E., M.Si selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan atas bantuannya selama saya melaksanakan penelitian. Beserta seluruh jajaran BPBD Kota Medan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Covey, S.R. 2011. *The 7 habits of Highly Level Effective People*. Free Pass
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana daerah
- Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
- Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

C. JURNAL DAN SKRIPSI

- Cahaya Ayuni Ningsih. 2022. Penelitian Terdahulu. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara*
- Lestari Indah. 2022. Penelitian Terdahulu *Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*
- Riantika Henrika. 2021. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*
- Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana. 2010. Penelitian Terdahulu. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*